

SKRIPSI
Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan dalam
Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak
(Studi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh:
RIFARI WIDYA KUSUMO
NIM. 0910110218



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013

ARTIKEL ILMIAH
Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam
Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak
(Studi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh:
RIFARI WIDYA KUSUMO
NIM. 0910110218



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Jurnal : EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT PAKSA DAN PENYITAAN DALAM
UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN
PAJAK (STUDI DI KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
TIMUR III)

Identitas Penulis :

a. Nama : Rifari Widya Kusumo

b. NIM : 0910110218

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu penelitian: 3 bulan

Disetujui pada tanggal : 12 April 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, SH.,M.Hum
NIP. 19600810 198601 1 002

Tunggul Anshari SN, SH.,MH.
NIP. 19590524 198601 1 001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH.,M.Hum
NIP. 19600810 198601 1 002

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN
PENYITAAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK
(Studi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III)**

Oleh : Rifari Widya Kusumo¹

ABSTRAKSI

Artikel ilmiah ini membahas tentang Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak. Hal ini didasarkan pada banyaknya masyarakat yang menunggak pajak. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak serta hambatan dan solusi pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa Penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan sebagai pelaksanaan dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa masih belum berlaku efektif di masyarakat dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Kanwil DJP Jatim III adalah penanggung pajak tidak kooperatif, wajib pajak tidak ditemukan, serta sumber daya manusia yang berada di Kanwil jumlahnya masih kurang. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut adalah Kanwil DJP Jatim III berusaha meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak membayar pajak, koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, pengadaan pegawai yang berasal dari lulusan sarjana universitas-universitas yang ada di Indonesia perlu ditambah jumlahnya.

Kata Kunci : Efektivitas, Penagihan Pajak, Surat Paksa, Penyitaan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

A. PENDAHULUAN

Kasus pajak tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Hampir setiap hari di media massa diberitakan adanya kasus pajak. Mulai dari masyarakat yang menunggak pajak hingga adanya pegawai pajak yang melakukan pelanggaran aturan pegawai pajak. Permasalahan tunggakan pajak dapat dilihat dari beberapa kasus yang telah diberitakan, baik tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak individu ataupun badan.

Kasus yang pertama adalah penunggak pajak di wilayah kerja Kantor Pajak Pratama Probolinggo.² Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menunggak Pajak Penghasilan tahun 2011 senilai Rp 637 juta. Kasus tunggakan pajak yang kedua adalah kasus yang ada di kota Malang di bawah naungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang ternyata cukup kompleks karena jumlah tunggakan pajak sangat tinggi yaitu mencapai Rp 44 miliar.³ Angka tersebut merupakan akumulasi sejak tahun 2002. Kedua kasus tersebut merupakan pelanggaran dari ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan yang dilanggar adalah mengenai kewajiban pajak. Kewajiban memberikan keterangan.

Jika utang pajak tidak segera dibayar maka utang tersebut dapat ditagih. Penagihan terhadap utang pajak dapat dilakukan dengan surat teguran. Apabila dengan penerbitan surat teguran wajib pajak tidak segera membayar maka akan diterbitkan surat paksa. Penerbitan surat paksa ini dilaksanakan sesudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat teguran atau surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak.

Apabila surat paksa tidak juga membuat wajib pajak membayar utangnya maka akan dilakukan penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan. Penerbitan ini dilaksanakan setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi.

² David Priyasidharta, **Anggota DPRD Lumajang Tunggak Pajak Rp 637 Juta** (*online*), 2012, <http://www.tempo.co>, diakses 16 Januari 2013.

³ Fia, **Tunggakan Pajak Capai Rp 44 Miliar** (*online*), 2012, <http://www.malang-post.com>, diakses 16 Januari 2013.

Penagihan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan agar wajib pajak dapat segera membayar utang pajaknya sehingga penerimaan pajak bertambah. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang cukup penting bagi terselenggaranya roda pemerintahan Indonesia. Dengan adanya penerimaan pajak maka pembangunan dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas diperlukan suatu penelitian mengenai “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak” yang berguna untuk mengetahui seberapa efektif tindakan penagihan tersebut dalam kaitannya dengan penerimaan pajak.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak?
2. Apa hambatan dan solusi pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak?

C. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dari penelitian yang dilakukan penulis, dimana jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Yuridis-empiris merupakan penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, yakni internalisasi hukum dalam pranata sosial, peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan penelitian di lapangan atau studi lapangan dan mengkaji ketentuan hukum yang terdapat di dalam masyarakat.⁴ Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk memahami serta menggambarkan permasalahan yang menyangkut peraturan perundang-undangan dalam hubungannya dengan penerapan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan. Selain itu pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan membahas efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.

⁴ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 215.

Penelitian ini bertujuan mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Untuk mengetahui, menganalisis serta menemukan hambatan dan solusi pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.

Di dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis data yaitu:

1. Data primer

Ialah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan.⁵ Sumber data primer mengacu pada hasil wawancara dengan para pihak yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yaitu dengan Kepala seksi bimbingan penagihan dan pelaksana bimbingan penagihan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku-buku, tulisan ilmiah, Undang-Undang, majalah, atau media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁶ Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dan penelusuran kepustakaan yang terkait dengan efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Adapun sumber data yang diperoleh dengan penelusuran dokumen dalam penelitian ini adalah data pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan yang ditangani oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III selama tahun 2010 s/d 2012.

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis ini digunakan sebagai pendukung untuk menambah dan mempertajam analisis yang dilakukan, membantu memahami masalah yang diteliti.

⁵ M.Iqbal Hasan, **Metodologi Penelitian dan Aplikasinya**, Remaja Karya, Bandung, 1999, hlm.35.

⁶ Roni Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.107.

D. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kota Malang

Kota Malang terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang dan secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan. Adapun sejarah Kota Malang adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Tahun 1767 Kompeni Hindia Belanda memasuki Kota;
- 2) Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda di pusatkan di sekitar kali Brantas;
- 3) Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen;
- 4) Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat Kota di dirikan dan Kota didirikan alun-alun di bangun;
- 5) 1 April 1914 Malang di tetapkan sebagai Kotapraja;
- 6) 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang;
- 7) 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia;
- 8) 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda
- 9) 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang.
- 10) 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang.

b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. Kantor wilayah ini berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III terletak di Jalan Letjen S. Parman No. 100 Kota Malang.

Tugas Kanwil DJP Jatim III adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan.⁸ Sedangkan fungsi Kanwil DJP Jatim III adalah pemberian bimbingan dan

⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang, diakses tanggal 4 Maret 2013.

⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak, pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan, bimbingan konsultasi dan penggalan potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer, pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan, penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian, bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan, bimbingan pelayanan dan penyuluhan.

2. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak

Dalam membahas efektivitas dapat dijelaskan melalui tahap-tahap berikut ini:⁹

a. Kondisi Tunggakan Pajak atau Utang Pajak

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar. Utang pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang PPSP adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak. Tetapi tidak semua wajib pajak melakukan kewajibannya dengan baik. Misalnya saja pada wilayah Kantor Wilayah DJP Jatim III, jumlah wajib pajak sangatlah banyak tetapi tidak semua wajib pajak tersebut telah membayar semua pajak terutanganya. Adapun jumlah wajib pajak yang masih mempunyai tunggakan adalah sebagai berikut:¹⁰

⁹ Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Bimbingan Penagihan, tanggal 20 Februari 2013-2 April 2013.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Bimbingan Penagihan, tanggal 20 Februari 2013-2 April 2013

Tabel 1
Data Tunggalan Wajib Pajak Sampai dengan Tahun 2012

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH WAJIB PAJAK
1.	KPP Pratama Kediri (622)	2.856
2.	KPP Pratama Malang Selatan (623)	6.670
3.	KPP Pratama Pasuruan (624)	8.671
4.	KPP Pratama Probolinggo (625)	-
5.	KPP Pratama Jember (626)	6.484
6.	KPP Pratama Banyuwangi (627)	11.087
7.	KPP Pratama Batu (628)	2.644
8.	KPP Pratama Tulungagung (629)	5.803
9.	KPP Madya Malang (651)	423
10.	KPP Pratama Malang Utara (652)	6.367
11.	KPP Pratama Blitar (653)	2.898
12.	KPP Pratama Kepanjen (654)	6.524
13.	KPP Pratama Pare (655)	8.900
14.	KPP Pratama Situbondo (656)	5.745
15.	KPP Pratama Singosari (657)	4.446
	TOTAL	79.518

(Sumber: Data Sekunder Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, diolah, 2013)

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah wajib pajak tertinggi yang masih mempunyai tunggakan hingga tahun 2012 adalah wajib pajak pada KPP Pratama Banyuwangi yaitu sebanyak 11.087 orang. Kemudian yang tertinggi kedua adalah wajib pajak pada KPP Pratama Pare yaitu sebanyak 8.900 orang. Dan yang ada di urutan ketiga adalah KPP Pratama Pasuruan yaitu sebanyak 8.671 orang wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak. Sedangkan untuk jumlah terendah wajib pajak yang menunggak pajak adalah KPP Pratama Madya Malang dengan jumlah

423 wajib pajak. Jumlah tunggakan pajak pada KPP Pratama Probolinggo tidak dapat penulis lampirkan datanya karena data rincian tidak dapat di download dari ALPP modul Penagihan pada Kanwil DJP Jatim III.

b. Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel data tunggakan wajib pajak sampai dengan tahun 2012 mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Banyuwangi, Pare dan Pasuruan masih sangat rendah. Beberapa tahun terakhir tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Pajak, Kismantoro Petrus yang mengungkapkan bahwa permasalahan utama perpajakan masih seputar tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih sangat rendah.¹¹ Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, baru sekitar 25 juta wajib pajak orang pribadi yang sudah membayar pajak dari sekitar 60 juta wajib pajak orang pribadi yang seharusnya membayar pajak. Untuk wajib pajak badan usaha, diperkirakan baru sekitar 520 ribu yang menyerahkan SPT (Surat Pemberitahuan). Jumlah tersebut adalah 10,4 persen dari sekitar 5 juta badan usaha yang seharusnya mampu membayar pajak.

Sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi berada di KPP Pratama Madya Malang dengan jumlah 423 wajib pajak. Wajib pajak pada KPP Pratama Madya Malang dianggap mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi karena hanya sedikit wajib pajak yang menunggak.

c. Pengukuran Efektivitas

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atas jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud

¹¹ Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah (*online*), <http://www.jpnn.com> diakses 10 Maret 2013.

dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa surat paksa terbit apabila:

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan Sekaligus.
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Sedangkan menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurangkurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.

Penagihan dengan surat paksa dan penyitaan mempunyai peran yang cukup penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan dengan adanya penagihan, wajib pajak yang masih mempunyai utang pajak akan segera membayar utangnya sehingga penerimaan dapat bertambah.

Adapun data kegiatan penagihan pajak yang ada di Kantor Wilayah DJP Jatim III adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Data Kegiatan Penagihan Pajak di Kantor Wilayah DJP Jatim III

TAHUN	JUMLAH SURAT PAKSA	JUMLAH PENYITAAN
2010	11.393	135
2011	7.940	77
2012	5.447	83

(Sumber: Data Sekunder Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, diolah, 2013)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami penurunan. Tahun 2010 hingga tahun 2011 kegiatan penagihan dengan surat paksa mengalami penurunan sebanyak 3.453 kegiatan. Sedangkan dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 2.493 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2010-2012 mengalami peningkatan.

Mengenai penagihan pajak dengan penyitaan dari tahun 2010 hingga tahun 2011 mengalami penurunan yaitu sebanyak 58 kegiatan. Sedangkan dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 6 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012 tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan.

Pada tahun 2010, jumlah penagihan dengan surat paksa adalah 11.393 dan penyitaan 135. Hal ini menunjukkan bahwa ada 11.258 utang pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak terutang. Sedangkan pada tahun 2011, jumlah penagihan dengan surat paksa adalah 7.940 dan penyitaan 77. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah utang pajak yang telah dibayar adalah 7.863. Dan pada tahun 2012 jumlah penagihan dengan surat paksa adalah 5.447 dan penyitaan 83. Hal ini menunjukkan bahwa 5.364 utang pajak telah dibayar oleh wajib pajak terutang. Adapun data perbandingan target pencairan piutang

dan pencairan dengan surat paksa dari beberapa KPP Pratama adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Data Perbandingan Target Pencairan Piutang dan Pencairan dengan Surat Paksa dari Beberapa KPP Pratama

UNIT KERJA	TAHUN					
	2010		2011		2012	
	Target Pencairan Piutang	Surat Paksa	Target Pencairan Piutang	Surat Paksa	Target Pencairan Piutang	Surat Paksa
622. Kediri	89%	34%	84%	5%	100%	49%
624. Pasuruan	91%	248%	107%	217%	106%	120%
625. Probolinggo	91%	208%	75%	44%	93%	100%
626. Jember	88%	58%	83%	38%	104%	53%
651. Madya Malang	85%	20%	87%	7%	93%	14%
653. Blitar	101%	36%	77%	16%	99%	17%
654. Kepanjen	114%	281%	81%	28%	91%	29%
656. Situbondo	92%	111%	68%	76%	101%	188%

(Sumber: Data Sekunder Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, diolah, 2013)

Sedangkan data perbandingan target pencairan piutang, pencairan dengan surat paksa dan pencairan dengan SPMP dari beberapa KPP pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Data Perbandingan Target Pencairan Piutang, Pencairan dengan Surat Paksa dan SPMP dari Beberapa KPP Tahun 2010

UNIT KERJA	PENCAIRAN	SURAT PAKSA	SPMP
622. Kediri	89%	34%	0%
624. Pasuruan	91%	248%	36%
625. Probolinggo	91%	208%	38%
626. Jember	88%	58%	175%
651. Madya Malang	85%	20%	33%
653. Blitar	101%	36%	0%
654. Kepanjen	114%	281%	42%
656. Situbondo	92%	111%	21%

(Sumber: Data Sekunder Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, diolah, 2013).

Adapun data perbandingan target pencairan piutang, pencairan dengan surat paksa dan pencairan dengan SPMP dari beberapa KPP tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Data Perbandingan Target Pencairan Piutang, Pencairan dengan Surat Paksa dan SPMP dari Beberapa KPP Tahun 2011

UNIT KERJA	PENCAIRAN	SURAT PAKSA	SPMP
622. Kediri	84%	5%	14%
624. Pasuruan	107%	217%	25%
625. Probolinggo	75%	44%	11%
626. Jember	83%	38%	36%
651. Madya Malang	87%	7%	15%
653. Blitar	77%	16%	0%
654. Kepanjen	81%	28%	8%
656. Situbondo	68%	76%	3%

(Sumber: Data Sekunder Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, diolah, 2013)

Tabel 6
Data Perbandingan Target Pencairan Piutang, Pencairan dengan Surat Paksa dan SPMP dari Beberapa KPP Tahun 2012

UNIT KERJA	PENCAIRAN	SURAT PAKSA	SPMP
622. Kediri	100%	49%	8%
624. Pasuruan	106%	120%	42%
625. Probolinggo	93%	100%	0%
626. Jember	104%	53%	0%
651. Madya Malang	93%	14%	50%
653. Blitar	99%	17%	29%
654. Kepanjen	91%	29%	142%
656. Situbondo	101%	188%	0%

(Sumber: Data Sekunder Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, diolah, 2013)

Dari data-data diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya penagihan dengan surat paksa dan penyitaan maka penerimaan pajak otomatis akan bertambah. Begitu juga sebaliknya bahwa apabila tidak ada penagihan dengan surat paksa dan penyitaan maka penerimaan tidak akan bertambah.

Apabila dikaitkan dengan efektivitas hukum, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa masih kurang efektif di masyarakat dalam hal upaya mengoptimalkan penerimaan pajak.

Menurut Soekanto suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila:¹²

- a. Telah mencapai tujuan yang dikehendaki terutama pembentuk hukum serta pelaksana hukum yang bersangkutan;
- b. Masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.

Dari kriteria diatas maka dapat dikatakan bahwa tindakan penagihan dengan surat paksa dan penyitaan sebagai pelaksanaan dari peraturan diatas masih kurang efektif. Peraturan ini dikatakan masih kurang efektif karena walaupun tujuan peraturan tersebut telah tercapai, yaitu adanya pertambahan penerimaan pajak, masyarakat khususnya wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak tidak semuanya mau membayar tunggakan pajaknya.

Menurut Siagian, untuk mengukur tingkat efektivitas dari suatu sistem kerja dapat juga dengan memberikan peringkat dengan menggunakan skala peringkat. Skala peringkat yang digunakan adalah sebagai berikut:¹³ (dalam presentase):

- a. > 100 sangat efektif;
- b. 90–100 efektif;

¹² Soerjono Soekanto, *Op cit.*

¹³ Sondang P. Siagian, *Loc.Cit*, hlm. 234.

- c. 80–89 cukup efektif;
- d. 70–79 kurang efektif;
- e. < 69 tidak efektif.

Apabila pendapat Siagian dikaitkan dengan data terkait penagihan dengan surat paksa maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2010 kegiatan penagihan yang dilakukan oleh semua KPP masih kurang efektif. Karena dalam penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP, tidak semua wajib pajak mau membayar tunggakan pajaknya. Ada 4 KPP (KPP Pasuruan, KPP Probolinggo, KPP Kepanjen, KPP Situbondo) yang tindakan penagihannya termasuk kategori sangat efektif yaitu telah mencapai lebih dari 100 %. Sedangkan penagihan pajak di 4 KPP lainnya yaitu KPP Kediri, KPP Jember, KPP Madya Malang, dan KPP Blitar termasuk kategori tidak efektif karena prosentasenya kurang dari 69 %. Pada tahun 2011 kegiatan penagihan pajak juga masih belum efektif. Karena ada 6 KPP yang penagihan pajaknya dikategorikan tidak efektif yaitu prosentasenya kurang dari 69 %. Dan 2 KPP lainnya termasuk kategori sangat efektif serta kurang efektif. Begitu pula pada tahun 2012, kegiatan penagihan pajak yang dilakukan KPP masih kurang efektif. Hal ini terbukti dari adanya 5 KPP yang termasuk kategori tidak efektif kegiatan penagihan pajaknya, 2 KPP termasuk sangat efektif dan 1 KPP termasuk kategori efektif.

Sedangkan apabila teori efektivitas Siagian dikaitkan dengan data terkait penagihan dengan penyitaan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2010 kegiatan penagihan pajak dengan penyitaan di 7 KPP tidak efektif karena belum mencapai 69 % sedangkan penagihan pajak pada 1 KPP tergolong sangat efektif. Pada tahun 2011 kegiatan penagihan pajak di 8 KPP tergolong tidak efektif karena masih dibawah 69 %. Dan pada tahun 2012 di 7 KPP penagihan pajak tergolong tidak efektif sedangkan 1 KPP tergolong sangat efektif.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa jika data dikaitkan dengan teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto dan Siagian, kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa serta penyitaan masih kurang berlaku efektif walaupun telah terjadi penambahan penerimaan pajak.

3. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak.

Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak, Kantor Wilayah DJP Jatim III memiliki hambatan-hambatan sebagai berikut:

- a. Penanggung pajak tidak kooperatif.
- b. Wajib pajak tidak ditemukan.
- c. Sumber daya manusia yang berada di Kanwil jumlahnya masih kurang.

Untuk menghadapi hambatan-hambatan diatas, Kanwil DJP Jatim III melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Kanwil DJP Jatim III berusaha meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak membayar pajak.
- b. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.
- c. Pengadaan pegawai yang berasal dari lulusan sarjana universitas-universitas yang ada di Indonesia dan tidak hanya berasal dari STAN saja.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan sebagai pelaksanaan dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa masih kurang efektif di masyarakat dalam hal upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Peraturan ini dikatakan masih kurang efektif karena walaupun tujuan peraturan tersebut telah tercapai, yaitu adanya pertambahan penerimaan pajak, wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak tidak semuanya mau membayar tunggakan pajaknya. Kegiatan penagihan dengan surat paksa dan

penyitaan di 8 (delapan) KPP masih kurang efektif, karena sebagian besar pencairan piutang pada KPP tersebut masih kurang dari 69 %.

b. Dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III mengalami hambatan sebagai berikut:

- 1) Penanggung pajak tidak kooperatif;
- 2) Wajib pajak tidak ditemukan;
- 3) Sumber daya manusia yang berada di Kanwil jumlahnya masih kurang.

Untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut pihak Kanwil DJP Jatim III melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Kanwil DJP Jatim III berusaha meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak membayar pajak;
- 2) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat;
- 3) Pengadaan pegawai yang berasal dari lulusan sarjana universitas-universitas yang ada di Indonesia perlu ditambah jumlahnya.

2. SARAN

a. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, yaitu:

- 1) Sebaiknya Kanwil DJP Jatim III membuat website agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai perpajakan dan dapat mengakses kegiatan apa saja yang diadakan Kanwil DJP Jatim III serta masyarakat dapat melapor apabila mereka mendapat pelayanan yang tidak baik dari KPP yang berada di daerah tempat tinggal mereka.
- 2) Mengenai wajib pajak yang tidak dapat ditemukan sebaiknya Kanwil DJP membuat daftar blacklist agar ketika ia mendaftar sebagai wajib pajak lagi di KPP yang berbeda dengan sebelumnya dapat terlacak.

DAFTAR PUSTAKA

- M.Iqbal Hasan, **Metodologi Penelitian dan Aplikasinya**, Remaja Karya, Bandung, 1999.
- Roni Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sondang P. Siagian, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Bumi Aksara. Jakarta, 2004.

Undang-Undang:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Online:

- David Priyasidharta, **Anggota DPRD Lumajang Tunggak Pajak Rp 637 Juta** (*online*), <http://www.tempo.co>, (16 Januari 2013), 2012.
- Fia, **Tunggakan Pajak Capai Rp 44 Miliar** (*online*), <http://www.malang-post.com>, (16 Januari 2013), 2012.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang
- Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah** (*online*), <http://www.jpnn.com>, (10 Maret 2013), 2012.